

BAB III
MONOGRAFI NAGARI SUNGAI TARAB KECAMATAN
SUNGAI TARAB DAN BADAN USAHA MILIK NAGARI

3.1 Kecamatan Sungai Tarab

3.1.1 Sejarah dan Gambaran Umum Nagari Sungai Tarab

Sekilas sejarah nagari Sungai Tarab pada awal berdirinya telah memenuhi 7 syarat untuk menjadi sebuah nagari, syarat-syaratnya yaitu:

1. Babalai Bamusajik

Di Sungai Tarab terdapat Balai atau tempat pertemuan untuk bermusyawarah dan bermufakat dan terdapat Masjid yang awalnya adalah Surau dan berkembang menjadi Masjid, Balai terletak di Pasar Sungai Tarab sekarang ini dan Masjidnya bisa dilihat berdiri kokoh di pinggir jalan lintas Batusangkar-Bukittinggi yang bernama Masjid Raya Sungai Tarab.

2. Basuku Banagari

Terdapat 8 suku di Nagari Sungai Tarab karena itulah terkenal dengan sebutan Sungai Tarab Salapan Batur. Syarat mendirikan nagari minimal adalah mempunyai 4 suku (Navis, 1984). Dari sini bisa dilihat bahwa Sungai Tarab layak menjadi sebuah nagari karena telah memenuhi syarat untuk berdirinya sebuah nagari.

3. Bakorong Bakampuang

Wilayah Sungai Tarab yang cukup luas menjadikan ia telah memenuhi syarat untuk sebuah nagari.

4. Balabuah Batapian

Pengaturan perhubungan dan lalu lintas serta perdagangan dan juga adanya akses jalan untuk masyarakat dan juga sebuah tapian atau tempat untuk mandi.

5. Basawah Baladang

Memiliki aturan dalam sistem usaha pertanian serta harta benda yang menjadi sumber kehidupan dan adanya hukum waris dimana tiap suku memiliki lahan yang pemakaiannya dan hasil usaha tersebut ada pengaturannya. Tidak lupa juga Area persawahan dan lahan untuk berladang sangat melimpah di Nagari Sungai Tarab, ini bisa dilihat bahwa Nagari Sungai Tarab adalah salah satu gudang beras di Kabupaten Tanah Datar.

6. Bagalanggan bapamedanan

Yakni memiliki ranah untuk mengadakan pesta rakyat atau kesenian agar bisa diselenggarakan bersama di ruang lepas

7. Bapandan bapakuburan

Tiap suku di nagari Sungai Tarab memiliki pandan pakuburannya masing-masing atau disebut juga pandan kaum atau suku (Setio YR. Dt. Madjo, 2012).

Setelah daerah kerajaan Bungo setangkai secara administratif dipindahkan ke Bukik Batu Patah dan berganti nama menjadi Kerajaan Bukik Batu patah lalu Kerajaan Pagaruyung, maka Nagari Sungai Tarab tetap dipimpin oleh keturunan datuk Bandaro Putih, mulailah tercatat pemimpin diluar pemerintahan kerajaan yaitu sebagai berikut:

- a. Mulai semenjak nagari berdiri sampai tahun 1916, Nagari Sungai Tarab dipimpin oleh Datuk Bandaro Putih yang dikenal dengan Tuanku panitahan.
- b. Iskandar Datuk Rangkayo Mansyur (1916-1925), memakai istilah Tuak palo Sunguik.
- c. Abdul latief Datuk Simaradjo (1925-1935), memakai istilah Tuak Palo Gaek.
- d. Djamaluddin Datuk Djomangkuto (1935-1945), memakai istilah Tuak Palo Mudo.
- e. Abdul Gani (1945-1951), memakai Istilah Tuak Palo.

- f. H. Buchari Muslim (1951-1960, memakai istilah Wali Nagari (Dari kepemimpinan H. Buchari Musli sampai sekarang memakai istilah Wali Nagari.
- g. Kusin Datuk Radjo Malano (1960-1965).
- h. Nurdin datuk Bagindo Sinaro (1965-1970).
- i. HBI Datuk Marah Banso (1970-1975).
- j. Syamsil Madjid Datuk Radjo Penghulu (1975-1980).
- k. Yusrilmar Datuk Majo Setio (2000-2002).
- l. Hardi Siswam Datuk Marah Banso (2002-2015).
- m. Kaslaila/PJ (24 Juli-30 November 2013).
- n. H. Emrizal, S. E (2013-2019).
- o. Syafrial, S. Sos (2019-2020).
- p. Pendriyasni, S, AP/PJ (2021-2022)
- q. Romi Chandra (2022-sekarang) (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Nagari Sungai Tarab 2022, 37).

Pemerintahan nagari di Sumatera Barat telah ada sebelum Belanda memasuki Indonesia, nagari seperti wilayah kekuasaan mini yang diperintah secara demokratis oleh segenap masyarakat. Nagari Sungai Tarab setelah lahirnya UU No. 5 tahun 1979 kembali berubah menjadi pemerintahan desa dan secara *de jure* pemerintahan nagari praktis hilang dari Sumatera Barat, kemudian pemerintah mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 yang memberikan peluang untuk menghidupkan kembali bentuk pemerintahan asli yaitu nagari jika masyarakat berkenan, kemudian UU ini disempurnakan oleh UU No. 32 tahun 2004 (Hariswati et all. 2018, 22).

Kecamatan Sungai Tarab merupakan salah satu wilayah yang memiliki peranan penting dalam sejarah kebudayaan dan pemerintahan tradisional di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan catatan sejarah dan tradisi lisan masyarakat, Sungai Tarab memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Pagaruyung, yaitu kerajaan besar yang menjadi pusat kekuasaan politik dan adat di wilayah Minangkabau pada masa lampau.

Secara etimologis, nama Sungai Tarab berasal dari dua kata, yaitu Sungai yang berarti aliran air, dan Tarab yang dalam bahasa Minangkabau dapat diartikan sebagai ramai, hidup, atau semarak. Nama tersebut diyakini menggambarkan kondisi daerah yang sejak dahulu ramai oleh aktivitas masyarakat di sekitar aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan. Sungai Tarab juga merupakan nama salah satu sungai yang melintasi kawasan ini, yakni Batang Tarab, yang menjadi bagian penting dari sistem irigasi pertanian penduduk (Hariswati et all. 2018, 22).

Pada masa kerajaan, wilayah Sungai Tarab dikenal sebagai salah satu nagari adat tertua di Luhak Nan Tuo (Tanah Datar). Dalam sistem pemerintahan adat Minangkabau, nagari-nagari di Sungai Tarab memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan sosial, adat, dan agama. Banyak tokoh ulama dan pemimpin adat yang lahir dari daerah ini, yang kemudian berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan pelestarian nilai-nilai adat Minangkabau (Yasril 2007, 213).

Seiring dengan perkembangan administrasi pemerintahan setelah kemerdekaan Indonesia, Sungai Tarab ditetapkan secara resmi sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Pembentukan kecamatan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Hingga saat ini, Sungai Tarab tetap dikenal sebagai wilayah yang kaya akan nilai sejarah, budaya, dan sumber daya alam yang potensial.

3.1.2 Keadaan dan Letak Geografis Nagari Sungai Tarab

1. Keadaan dan Letak Geografis Nagari Sungai Tarab

Kecamatan Sungai Tarab merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar, yang terdiri dari 10 Nagari dan 32 Jorong yang memiliki luas wilayah 71,85 Km², dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Umum Kecamatan Sungai Tarab

No	Nagari	Jorong	Luas (Km ²)
1.	Sungai Tarab	Koto Hiliang	1,91
		Koto Panjang	2,45
		Sungai Tarab	6,13
		Tigo Batua	2,47
			12,96
2.	Rao-Rao	Pandiang Andiko	2,50
		Carano Batirai	1,50
		Balerong Bunta	1,50
		Lumbuang Bapereng	2,00
			7,50
3.	Kumango	Kumango Utara	1,75
		Kumango Selatan	2,00
			3,75
4.	Koto Baru	Aie Manumbuak Batu	0,67
		Bujang Juara	2,00
		Sarasah	1,50
			4,17
5.	Koto Tuo	Babussalam	0,35
		Koto Tuo	0,50
		Pematang Tinggi	0,40
			1,25
6.	Simpuruik	Simpuruik	1,30
		Sijangek	1,55
			2,85
7.	Gurun	Ampalu	2,10
		Gurun	4,16
		Luak Gadang	1,38
		Sitakuak	1,73
			9,37
8.	Pasie Laweh	Babussalam	3,39
		Lurah Ampang	4,66
		Talang Dasun	2,25
		Tanjuang Lado Ateh Bukik	3,45
			13,75

9.	Talang Tengah	Talang Tengah Gunuang Medan	1,00
			2,50
			3,50
10.	Padang Laweh	Guguak Ateh	3,25
		Guguak Baruah	3,50
		Padang Laweh	2,75
		Padang Laweh Baruah	3,25
			12,75
		Total Luas	71,85

Sumber: Camat Sungai Tarab, 2018

Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa proporsi luas wilayah setiap nagari di bandingkan total luas kecamatan Sungai Tarab, dimana setiap irisan mewakili satu nagari dengan persentase luas yang berbeda, memperlihatkan berapa besar wilayah nagari tersebut. Berikut ini penjelasan rincian persentase wilayah nagari di atas:

- a. Nagari Pasie Laweh, memiliki luas wilayah terbesar, sekitar 19,14% dari total wilayah kecamatan.
- b. Nagari Sungai Tarab menyusul dengan 18,04%, berada pada urutan ke dua setelah wilayah Nagari Pasie Laweh.
- c. Nagari Padang Laweh, luas wilayahnya mencapai 17,75%, berada di urutan ketiga.
- d. Nagari Rao-Rao menempati 10,44% wilayah kecamatan, berada pada urutan ke empat
- e. Nagari Gurun juga memiliki 10,44%, berada pada urutan ke lima
- f. Nagari Koto Baru dan Nagari Talang Tengah masing-masing luas wilayah sekitar 5,80 % dan 5,80%.
- g. Nagari Kumango 5,22%, berada pada urutan ke delapan dari total wilayah kecamatan.
- h. Nagari Simpuruik paling kecil dengan 3,97%, dari total wilayah kecamatan.
- i. Nagari Koto Tuo yang merupakan wilayah paling kecil terakhir di anantara total luas keseluruhan wilayah kecamatan di atas.

Secara geografis, wilayah ini terletak di bagian tengah Kabupaten Tanah Datar, dengan posisi yang strategis karena berada di jalur penghubung antara pusat pemerintahan Kabupaten di Kota Batusangkar dengan wilayah selatan dan timur seperti Kecamatan Lintau Buo dan Kecamatan Sungayang.

Secara astronomis, Kecamatan Sungai Tarab berada pada posisi antara $0^{\circ}26'$ – $0^{\circ}33'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}36'$ – $100^{\circ}43'$ Bujur Timur. Letak ini memberikan pengaruh terhadap kondisi iklim dan pola kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor pertanian dan pemukiman (Hariswati et al. 2018, 23).

Adapun batas-batas administratif Kecamatan Sungai Tarab adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Salimpaung.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lima Kaum.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pariangan.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungayang.

Kecamatan Sungai Tarab berjarak sekitar 10 kilometer dari Kota Batusangkar, ibu kota Kabupaten Tanah Datar. Lokasi ini menjadikan Sungai Tarab memiliki posisi yang strategis, karena selain dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten, juga dilalui oleh jalur transportasi utama yang menghubungkan berbagai kecamatan di Tanah Datar bagian tengah (Edison et al. 2007, 118).

2. Luas Wilayah dan Pembagian Administratif

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar, luas wilayah Kecamatan Sungai Tarab adalah sekitar 71, 85 km². Secara administratif, wilayah ini terdiri atas 10 nagari, yaitu:

Tabel 3.2
Luas Daerah Menurut Nagari di Kecamatan Sungai Tarab

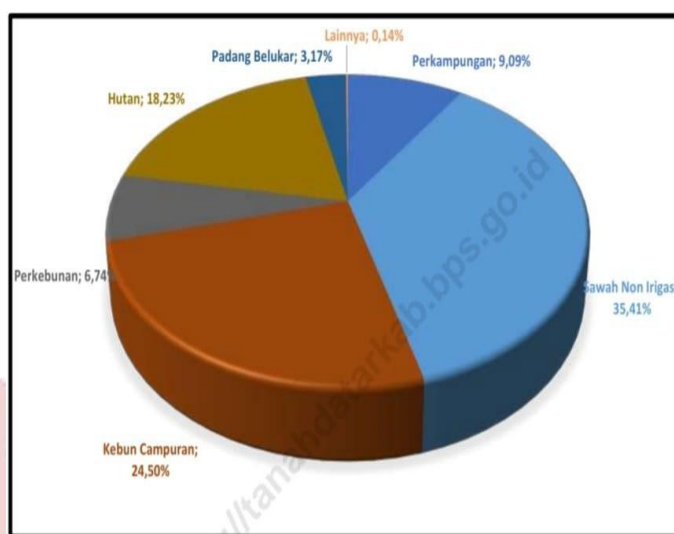
KECAMATAN SUNGAI TARAB			
NO	Nama Nagari	Luas Total Area (km²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1	Sungai Tarab	12,96	18,04
2	Rao-Rao	7,50	10,44
3	Kumango	3,75	5,22
4	Koto Baru	4,17	5,80
5	Koto Tuo	1,25	1,74
6	Simpuruik	2,85	3,97
7	Gurun	9,37	13,4
8	Pasie Laweh	13,75	19,14
9	Talang Tengah	3,50	4,87
10	Padang Laweh	12,75	17,75
	Sungai Tarab	71,85	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, 2023

Masing-masing nagari memiliki sejumlah jorong (dusun) yang menjadi satuan administratif terkecil. Pemerintahan di setiap nagari dipimpin oleh Wali Nagari, sedangkan di tingkat kecamatan dipimpin oleh Camat Sungai Tarab. Pembagian wilayah ini memperlihatkan struktur sosial dan pemerintahan adat Minangkabau yang masih kuat, di mana sistem administrasi modern berjalan berdampingan dengan sistem adat yang diatur berdasarkan falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.*”

Selain luas wilayah berdasarkan kecamatan Sungai Tarab sebagaimana yang di jelaskan pada tabel di atas, terdapat juga gambar diagram luas wilayah kecamatan Sungai Tarab menurut Penggunaannya sebagai berikut:

Gambar 3.1
Luas Wilayah Kecamatan Sungai Tarab Menurut Penggunaannya



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar, 2023

Diagram ini memvisualisasikan pembagian penggunaan lahan di Kecamatan Sungai Tarab pada tahun 2023 ke dalam beberapa kategori utama, berikut dengan persentasenya:

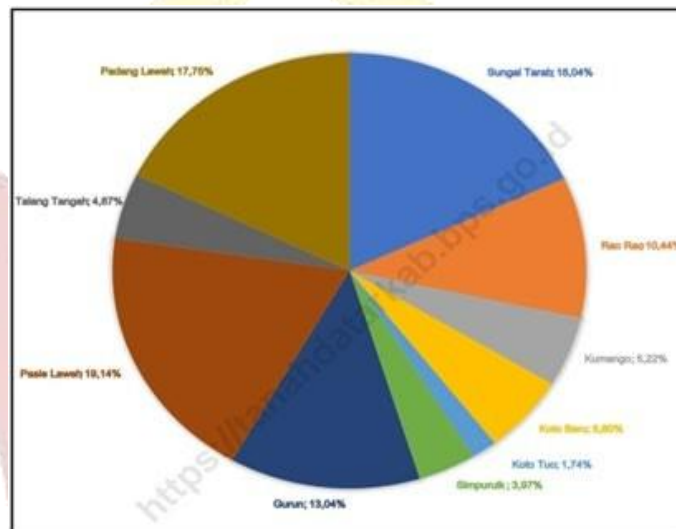
- a. Sawah Non Irigasi: 35,41% merupakan lahan terbesar, dipakai untuk sawah tanpa irigasi.
- b. Kebun Campuran: 24,50% merupakan area untuk perkebunan berbagai jenis tanaman.
- c. Hutan: 18,23% merupakan kawasan yang masih dilapisi vegetasi hutan.
- d. Perkampungan: 9,09% merupakan wilayah permukiman penduduk.
- e. Perkebunan: 6,74% merupakan lahan khusus untuk komoditas perkebunan tertentu.
- f. Padang Belukar: 3,17% merupakan area semak belukar yang belum tergarap optimal.

g. Lainnya: 0,14% merupakan kategori penggunaan lahan lain yang tidak termasuk kelompok di atas.

Data ini menunjukkan dominasi dua penggunaan terbesar, yakni sawah non irigasi serta kebun campuran, sementara hutan dan perkampungan juga mengambil porsi signifikan.

Selain itu, juga terdapat luas daerah menurut nagari, sebagaimana terlihat pada gambar diagram di bawah ini:

Gambar 3.2
Luas Daerah Menurut Nagari



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar, 2023

Diagram ini memvisualisasikan pembagian luas daerah menurut nagari di Kecamatan Sungai Tarab pada tahun 2023 ke dalam beberapa kategori utama, berikut dengan persentasenya:

- Nagari Pasie Laweh (19,14%), memiliki persentase luas wilayah terbesar. Nagari ini merupakan wilayah administratif yang paling luas di Kecamatan Sungai Tarab.
- Nagari Sungai Tarab (18,04%), wilayah nagari kedua terluas setelah Nagari Pasie Laweh. Menjadi salah satu pusat aktivitas dan administrasi Kecamatan Sungai Tarab.

- c. Nagari Padang Laweh (17,75%), merupakan nagari dengan wilayah cukup luas, menduduki posisi ketiga. Berpotensi memiliki sumber daya dan fungsi strategis dalam kecamatan.
- d. Nagari Gurun (13,04%), wilayah nagari yang juga signifikan luasnya dalam pembagian wilayah. Seringkali menjadi fokus kegiatan sosial-ekonomi di kecamatan.
- e. Nagari Rao-Rao (10,44%), memiliki wilayah dengan proporsi yang moderat dibanding nagari lain. Penting untuk memperhatikan pengembangan wilayah ini agar merata.
- f. Nagari Koto Baru (5,80%), nagari dengan wilayah lebih kecil dibandingkan kelompok nagari besar lainnya. Pengelolaan wilayahnya harus efisien dan tepat sasaran.
- g. Nagari Kumango (5,22%), mewakili wilayah kecil lain dalam kecamatan. Memiliki peran spesifik dalam pola penyebaran penduduk atau kegiatan pertanian.
- h. Nagari Talang Tengah (4,87%), salah satu nagari dengan luas terendah. Biasanya memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi atau fungsi administratif khusus.
- i. Nagari Simpuruik (3,97%), menjadi nagari dengan wilayah terkecil. Pengembangan wilayah ini harus menyesuaikan dengan keterbatasan luas geografis.
- j. Nagari Koto Tuo (1,74%), termasuk wilayah kecil atau subdivisi lain yang tidak disebutkan secara spesifik. Mewakili bagian kecil dari keseluruhan wilayah kecamatan.

Penjelasan ini merefleksikan bagaimana wilayah administratif kecamatan Sungai Tarab terbagi menurut nagari dengan masing-masing proporsi wilayah.

3. Kondisi Topografi

Kecamatan Sungai Tarab memiliki kondisi topografi yang bergelombang hingga berbukit, dengan ketinggian wilayah antara

600

sampai 800 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah bagian tengah cenderung berupa dataran landai yang digunakan sebagai areal persawahan dan permukiman, sedangkan bagian utara dan timur memiliki perbukitan dan dataran tinggi yang ditumbuhi hutan serta kebun masyarakat (Silvis et al. 2004, 14).

Kondisi tanah di wilayah ini tergolong subur, karena merupakan bagian dari dataran tinggi vulkanik hasil endapan abu Gunung Marapi dan Gunung Singgalang. Jenis tanah yang mendominasi adalah andosol dan latosol, yang sangat cocok untuk pertanian, baik tanaman pangan maupun hortikultura.

4. Kondisi Iklim dan Cuaca

Kecamatan Sungai Tarab termasuk ke dalam daerah beriklim tropis basah yang dipengaruhi oleh pola iklim monsun. Curah hujan rata-rata mencapai 2.500 – 3.000 mm per tahun, dengan suhu udara berkisar antara 18°C – 26°C. Kelembapan udara relatif tinggi (sekitar 85%) dan jumlah hari hujan mencapai 180–200 hari per tahun. Jumlah hujan terbanyak adalah Batusangkar dan Sungai Tarab, sementara curah hujan yang paling tinggi biasanya terjadi pada bulan November dan curah hujan yang paling rendah terdapat pada bulan Mei (Kantor Camat Sungai Tarab, 2025). Kondisi iklim seperti ini sangat mendukung kegiatan pertanian lahan basah, khususnya tanaman padi sawah, sayur-sayuran, cabai, serta bawang merah. Selain itu, iklim yang sejuk menjadikan daerah ini nyaman untuk dihuni dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

5. Kondisi Hidrologi

Ciri geografis yang paling menonjol di Kecamatan Sungai Tarab adalah keberadaan Batang Tarab, yaitu sungai besar yang melintasi wilayah ini dan menjadi sumber utama pengairan sawah masyarakat. Batang Tarab merupakan anak sungai dari Batang Sinamar, yang bermuara ke Sungai Indragiri di wilayah hilir Sumatera Barat. Selain Batang Tarab, terdapat

beberapa anak sungai kecil dan mata air yang berperan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, terutama untuk irigasi, perikanan air tawar, serta kebutuhan rumah tangga. Ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun menjadikan Sungai Tarab sebagai salah satu lumbung padi utama di Kabupaten Tanah Datar.

6. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan lahan di Kecamatan Sungai Tarab menunjukkan karakteristik wilayah agraris. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, komposisi penggunaan lahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Komposisi Penggunaan Lahan dan Persentasenya

NO	Komposisi Penggunaan Lahan	Persentase
1	Lahan pertanian sawah dan lading	60%
2	Permukiman penduduk	15%
3	Perkebunan dan kebun campuran	10%
4	Hutan dan semak belukar	10%
5	Fasilitas umum (jalan, kantor, sekolah, dll)	5%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, 2023

Tabel 3.3. di atas menjelaskan bahwa komposisi penggunaan lahan dalam suatu wilayah berdasarkan persentase penggunaannya. Berikut penjelasan untuk masing-masing kategori:

- a. Lahan pertanian sawah dan ladang memiliki porsi terbesar, yaitu 60%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas lahan digunakan untuk kegiatan pertanian, khususnya sawah dan ladang sebagai sumber utama penghidupan bagi masyarakat di wilayah tersebut.
- b. Permukiman penduduk mencakup 15% dari total lahan. Ini adalah area yang digunakan untuk keperluan hunian dan pemukiman masyarakat, menandakan adanya pemukiman yang cukup signifikan.

- c. Perkebunan dan kebun campuran menguasai 10% lahan, yang mencerminkan kegiatan bercocok tanam selain sawah utama, mungkin tanaman hortikultura atau tanaman campuran lainnya.
- d. Hutan dan semak belukar juga mengisi 10% lahan, yang penting untuk keseimbangan ekosistem, sebagai ruang hijau dan habitat fauna serta penyangga lingkungan. Fasilitas umum seperti jalan, kantor, sekolah, dan lainnya mengambil 5% lahan, yang mencerminkan alokasi ruang untuk kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik.

7. Kondisi Alam dan Potensi Wilayah

Dari segi kondisi alam, Kecamatan Sungai Tarab memiliki keunggulan berupa tanah yang subur, iklim sejuk, serta ketersediaan air yang melimpah. Potensi ini dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan dalam bidang pariwisata budaya dan sejarah, karena letaknya berdekatan dengan pusat peninggalan Kerajaan Pagaruyung di Batusangkar. Beberapa masjid tua, surau, dan situs adat di Sungai Tarab menjadi bagian dari warisan sejarah Minangkabau yang masih lestari hingga kini.

3.1.3 Pendidikan Sosial Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat di Nagari Sungai Tarab

1. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Kecamatan Sungai Tarab. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar, tingkat partisipasi sekolah di kecamatan ini tergolong tinggi, sejalan dengan budaya masyarakat Minangkabau yang menempatkan pendidikan sebagai sarana utama untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan keluarga (Nizwardi et al. 2007, 1).

Secara umum, fasilitas pendidikan di Kecamatan Sungai Tarab mencakup:

Tabel 3.4
Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Sungai Tarab Periode 2021-2023

Tingkat Pendidikan	Tahun		
	2021	2022	2023
SD	10	10	10
MI	1	1	1
SMP	6	6	6
MTS	4	4	4
SMA	3	4	4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, 2023

Tabel 3.4 menunjukkan jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Sungai Tarab untuk periode tahun 2021 hingga 2023. Berikut penjelasan untuk masing-masing tingkat pendidikan:

- a. SD (Sekolah Dasar) memiliki 10 fasilitas setiap tahun dari 2021 sampai 2023, menunjukkan jumlah sekolah dasar stabil selama tiga tahun.
- b. MI (Madrasah Ibtidaiyah) juga konsisten dengan 1 fasilitas setiap tahun, setara dengan sekolah dasar tetapi bernaung di bawah Kementerian Agama dengan pendidikan agama Islam lebih intensif.
- c. SMP (Sekolah Menengah Pertama) jumlahnya tetap 6 fasilitas setiap tahun, untuk jenjang pendidikan menengah pertama.
- d. MTs (Madrasah Tsanawiyah) yang setara SMP namun dengan muatan agama Islam lebih besar, memiliki 4 fasilitas setiap tahun tanpa perubahan.
- e. SMA (Sekolah Menengah Atas) jumlah fasilitas sedikit berfluktuasi, 3 di tahun 2021, dan kembali naik menjadi 4 pada tahun 2022 hingga 2023.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan kestabilan jumlah fasilitas pendidikan dasar dan menengah di Kecamatan Sungai Tarab selama tiga tahun terakhir, dengan sebagian besar fasilitas mencapai kestabilan sementara SMA mengalami sedikit perubahan. Perbedaan antara sekolah umum (SD, SMP, SMA) dengan madrasah (MI, MTs) terutama terletak pada pengelolaan dan penambahan kurikulum agama Islam yang lebih intensif di madrasah

Sebagian besar anak-anak di Sungai Tarab menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas, dan sebagian lainnya melanjutkan ke perguruan tinggi di Batusangkar, Padang, atau Bukittinggi. Kualitas pendidikan di kecamatan ini juga ditopang oleh tenaga pendidik yang cukup memadai, baik guru ASN maupun honorer. Selain itu, tingkat melek huruf (literasi) masyarakat mencapai lebih dari 95%, menandakan kesadaran pendidikan yang tinggi di kalangan penduduk. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan sarana belajar di beberapa sekolah, serta perlunya peningkatan fasilitas pendidikan kejuruan agar sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal.

2. Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Sungai Tarab merupakan bagian dari suku Minangkabau, yang terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Dalam kehidupan sosial, masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai adat, agama, dan gotong royong. Falsafah hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat adalah:

“Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”
yang berarti adat didasarkan pada syariat Islam, dan syariat Islam berdasarkan pada Al-Qur'an.

Nilai-nilai tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari, seperti semangat musyawarah, kerja sama, saling tolong-menolong (gotong royong) dan kepedulian sosial antarwarga. Kegiatan sosial masyarakat banyak terorganisir melalui wadah seperti:

- a. Kerapatan Adat Nagari (KAN),
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),

- c. Kelompok PKK dan Karang Taruna, serta
- d. Majelis Taklim dan Organisasi Remaja Masjid (ORMAS).

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Struktur ekonomi masyarakat Sungai Tarab didominasi oleh sektor pertanian, diikuti oleh sektor perdagangan dan jasa kecil menengah. Sekitar 65–70% penduduk bekerja di bidang pertanian, baik sebagai petani padi sawah, hortikultura, maupun peternak.

Jenis hasil pertanian utama meliputi :

- a. Padi sawah (komoditas utama dan sumber pangan daerah),
- b. Cabai merah dan bawang merah,
- c. Sayur-sayuran dataran tinggi,
- d. Serta perkebunan kecil seperti kopi, tebu, dan kelapa.

4. Kehidupan Keagamaan Masyarakat

Kehidupan keagamaan masyarakat Sungai Tarab sangat kental dengan ajaran Islam, yang menjadi dasar moral dan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh penduduk (lebih dari 98%) memeluk agama Islam, dan kegiatan keagamaan sangat aktif di tingkat nagari maupun jorong. Setiap nagari memiliki masjid utama, surau, dan mushalla yang digunakan untuk kegiatan ibadah, pengajian, dan pendidikan agama. Peran ulama, ustaz, dan ninik mamak (pemuka adat) sangat sentral dalam mengarahkan kehidupan masyarakat agar tetap berpedoman pada nilai-nilai agama dan adat. Kolaborasi antara pemimpin adat dan agama menjadikan Sungai Tarab sebagai salah satu contoh masyarakat religius yang beradat di Tanah Datar.

Kecamatan Sungai Tarab memiliki kondisi pendidikan, sosial ekonomi, dan keagamaan yang saling berkaitan dan mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Kesadaran pendidikan yang tinggi, kehidupan sosial yang harmonis, serta semangat religius yang kuat menjadikan masyarakat Sungai Tarab sebagai potret masyarakat Minangkabau yang masih menjunjung tinggi falsafah hidup “*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” (Febby, 2015).

Potensi sumber daya manusia dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Sungai Tarab merupakan modal penting dalam mendukung kemajuan daerah, khususnya dalam bidang pertanian, pendidikan, dan pembangunan berbasis nilai-nilai budaya dan keagamaan (Agus Noorbani, 2008).

3.2 Profil Nagari Sungai Tarab

3.1 Sejarah Nagari Sungai Tarab

Dalam membuat atau menjelaskan sejarah Nagari Sungai Tarab agak sulit menuliskannya secara tepat, hal ini disebabkan karena sejarah nagari di Sumatera Barat tidak ada bentuk yang tertulis dalam buku secara jelas, berlainan dengan sejarah Desa diluar Sumatera Barat, tapi walaupun demikian untuk menggambarkan atau menjelaskan asal usul atau sejarah Nagari di Sumatera Barat berpedoman kepada cerita – cerita atau pesan dari leluhur orang di Minang Kabau (Sumatera Barat) seperti yang diungkapkan dalam pepatah atau pantun dibawah ini :

*Birik – birik tabang kasamak
Dari samak tabang ka halaman
Tibo dihalaman mamakan padi
Dari niniak turun kamamak
Dari mamak turun kakamanakan
Baitu juo sampai kini*

Berpijak dari ungkapan pantun diatas yang kami terima secara turun temurun, maka sejarah Nagari Sungai Tarab dapat kami uraikan sebagi berikut :di berbagai Tambo Alam Minang Kabau “ Mengatakan bahwa Nagari Sungai Tarab adalah Nagari tertua nomor dua (2) di Minang Kabau setelah Pariangan Padang Panjang “.

Karena itu Nagari Sungai Tarab tidak bisa terlepas dari rangkaian peristiwa demi peristiwa di Alam Minang Kabau sangat kait berkaitan dengan keberadaan Nagari Sungai Tarab seperti :

- Jika dilihat dari sisi Limbago Adat Minang kabau, maka kedudukan Nagari

Sungai Tarab sebagai Pemuncak Alam Koto Piliang.

- Nagari Sungai Tarab adalah merupakan pusat Kerajaan Bungo Setangkai yang diawali dengan kedatangan Nenek Moyang dari Puncak Gunung Merapi.
- Jika dilihat dari sisi Kerajaan Pagaruyung, Maka Nagari Sungai Tarab dengan Tuanku Panitahannya yang berfungsi sebagai Perdana Menteri Kerajaan Pagaruyung yang dikenal dengan Ketua Basa Ampek Balai.

Ada beberapa pendapat mengatakan :

1. Profesor Dr. Bahder Djohan

Menurut Profesor Dr. Bahder Djohan mengungkapkan dalam seminar Nasional Sejarah dan Kebudayaan Minang Kabau yang dihadiri puluhan Pakar Sejarah dari dalam dan luar negeri dengan makalahnya berjudul “ Manusia Minang sebagai suatu fenomena Sosiologik “ bahwa sejak empat ribu (4000) tahun yang lalu mulailah berpindahan penduduk atau Nenek Moyang kita dari daratan Asia dan menepati ke Pulau Andalas.

2. Drs. Mid Djamal

Menurut Drs. Mid Djamal dalam bukunya berjudul “ Menyigi Tambo Alam Minang Kabau” mengatakan bahwa Nenek Moyang Suku Minang Kabau terdiri dari kelompok manusia yang telah mendiami daerah selingkar Gunung Merapi. Sehingga dalam Tambo Minang Kabau mengatakan bahwa asal penduduk Nagari Sungai Tarab adalah dikiaskan dalam pepatah sebagai berikut :

Dari mano asa titiak palito

Dari baliak telong nan batali

Dari mano asa niniak kito

Iyo dari puncak gunuang marapi.

Setelah turun dari puncak Gunung Merapi, maka satu kelompok yang dipimpin oleh Sri Maha Radjo Diradjo menuju / mengambil tempat di Tantolan,

kemudian berselang beberapa tahun lamanya datang pula satu kelompok yang dipimpin oleh Dt. Katumanggungan dan membuat kampung yang diberi nama dengan Binuang Sati (Daerah Binuang Suku Mandahiling, Jorong Sungai Tarab, Nagari Sungai Tarab) dan dikampung Binuang Sati inilah mengalir sebuah sungai yang airnya sangat jernih sekali dan dipinggirnya terdapat / ditumbuhi beberapa Batang Tarok. Maka dari sebuah sungai dan beberapa batang tarok inilah asal mula atau sebutan Nagari Sungai Tarok dan akhirnya kemudian Sungai Tarok diubah menjadi Sungai Tarab.

Untuk mencari asal usul penduduk Nagari Sungai Tarab, perlu perlu kita berbalik kebelakang selintas kilas yang merujuk kepada kitab sejarah melayu karangan Tun Sri Lanang tahun 1621, menyebutkan bahwa : Kedatangan nenek moyang suku Minangkabau dipimpin oleh Depunta Hyang – Sri Maharadjo Diradjo tujuan utama ke Gunung Merapi.

3. F. M. Schnitger

Concervator of Museum at Palembang mengatakan, bahwa perjalanan Depunta Hyang – Sri Maharadjo Diradjo dari Tanah Basa disekitar Lembah Indus pertama kali menginjakkan kakinya adalah di Gunung Merapi yang terletak ditengah – tengah Pulau Sumatera, dari sinilah disebarkan penduduk kesekitar Gunung Merapi.

4. Mr. Mohammad Yamin

Mengutip dari kitab sejarah Melayu karangan Tun Sri Lanang tahun 1621 mengatakan :

Bahwa pada suatu malam sebelum tahun 517 masehi, dua orang wanita bernama “ Wan Empu dan Wan Malini “ melihat dari tempatnya ada bernyala – nyala api diatas bukit siguntang yang dikenal dengan Gunung Merapi.

Barang kali mungkin api itulah yang dimaksudkan oleh nenek moyang orang Minangkabau yang dituangkan kedalam tambo yang berbunyi sebagai berikut :

Dimano titiak palito

Dibaliak telong nan batali

Dari mano turun niniak kito

Dari puncak gunung merapi

Hal ini dikuatkan oleh Dt. Sangguno Diradjo Sungayang dalam bukunya yang berjudul “ *Curaian Adat Alam Minangkabau* “ mengatakan bahwa : orang yang mula – mula datang mendiami Pulau Andalas ini adalah Sri Maharadjo Diradjo yang berasal dari Tanah Basa Voor Indie, Sri Maharadjo Diradjo yakni ayah Dt Katumanggungan semasa beliau memimpin Kerajaan Pasumayam Koto Batu di Pariangan dalam rangka memperluas daerah beliau membuat taratak, kemudian taratak ini berkembang menjadi kampung dan kampung ini diberi nama oleh Sri Maharadjo Diradjo dengan “ TANTOLAN “ .

Artinya kata “ TAN “ berasal dari kata TUWAN, kalau di Malaka kata TAN berubah sebutannya menjadi “ TUN “. Dan TUN berasal dari kata TO/TO’ menurut bahasa sanskerta artinya orang mulia, TOLAN menurut bahasa sanskerta artinya Saudara, menurut bahasa Minangkabau artinya Dunsanak, jadi arti kampung Tantolan adalah Kampung orang mulia, saudara juga dapat diartikan dengan Saudara kelompok orang mulia.

Disini terlihat bahwa istilah Gantang Tolan, untuk itu kami menghimbau jangan merobah – robah istilah ini menurut pemikiran pribadi sebab bisa mewariskan sejarah yang salah kepada generasi penerus apalagi jika yang merobah itu sebagai pemegang sako lebih berbahaya lagi. Selanjutnya sejarah mengatakan sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. Mid Djamal dalam bukunya berjudul Menyigi Tambo Alam Minang menjelaskan ; Bahwa Dt. Katumanggungan pergi meretas daerah ke Sungai Tarab dengan membawa seorang adik se-ibu berlain Ayah yang bernama Puti Reno Suda ada juga yang menyebut dengan Puti Djamilan, kemudian Dt. Katumanggungan mendirikan Kerajaan Bungo Setangkai.

Setelah Sri Maharadjo Diradjo yakni ayah Dt. Katumanggungan mendirikan kampung Tantolan, beberapa tahun kemudian setelah Dt. Katumanggungan beranjak dewasa beliau berangkat dari Pariangan menuju kampung Tantolan bersama rombongan dan ditambah dengan keluarga beliau delapan laki – laki dan delapan perempuan inilah bakal menjadi Dt. Nan Salapan kemudian hari, sesampai pada suatu tempat terlihat seekor kerbau jantan yang dikenal nama

Binuang, lalu diperintahkan oleh Dt. Katumanggungan supaya kerbau itu ditangkap setelah terkepung kerbau itu disa'at mau ditangkap kerbau itu tiba – tiba menghilang, semua orang tercengang dalam kesunyian, diwaktu sedang kesunyian datang suara memecah keheningan tersebut, maka disinilah Dt. Katumanggungan memerintahkan untuk tinggal membuat kampung diberi nama dengan Kampung Binuang Sakti, sampai sekarang kampung itu tetap disebut oleh masyarakat Sungai Tarab dengan kampung Binuang Sakti.

Lama – kelamaan sejalan dengan perkembangan penduduk, disatukan kedua kampung ini yakni kampung Tantolan dengan kampung Binuang Sati sehingga menjadi sebuah Nagari dengan Nama Bungo Setangkai. Artinya dua kampung diibaratkan dengan dua kuntum bunga dengan memiliki satu tangkai, maksudnya dua kampung menjadi satu nagari yang dipimpin oleh seorang penghulu yang dikenal dengan Penghulu Pucuk Nagari yaitu Dt. Bandaro Putih.

Setelah terbentuk Nagari Bungo Setangkai sebagai upaya pengembangan dan perluasan wilayah Kerajaan Pasumayam Koto Batu di Pariangan, maka didirikanlah Kerajaan dengan nama Kerajaan Bungo Setangkai, sejalan dengan itu diganti nama dengan Nagari dengan Nagari Sungai Tarab yang dilatar belakangi oleh mata air yang keluar dibawah kayu tarab, semenjak itu sampai sekarang tersebutlah dalam masyarakat Ba – Sungai Ba –Kayu Tarab, Barajo Bungo Setangkai.

5. Ibrahim Dt. Sangguno Diradjo Sungayang

Dalam bukunya yang berjudul “ Curaian Adat Minangkabau “ mengatakan : bahwa Nagari yang mula – mula berdiri setelah Pariangan di Minangkabau adalah sebagai berikut :

- Pertama Nagari Sungai Tarab
- Kedua Nagari Lima Kaum
- Ketiga Nagari Tanjung - Sungayang

Disini jelas bahwa Nagari Sungai Tarab adalah Nagari Tertua Nomor dua setelah Pariangan sebagaimana tersebut dalam Tambo Minangkabau. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asal usul penduduk Nagari Sungai Tarab,

pada mulanya berasal dari rombongan Depunta Hyang Sri Maharadjo Diradjo yang datang dari Tanah Basa disekitar lembah Indus, kemudian ditambah dengan anggota rombongan yang dibawa oleh Dt. Katumanggungan yakni anak dari Sri Maharadjo Diradjo yang membuat kampung pula dengan nama Binuang Sakti dan kampung Tantolan , kemudian kedua kampung ini disatukan sehingga menjadi Nagari Sungai Tarab.

1. Sebelum Kerajaan Pagaruyung

Mengkaji Nagari Sungai Tarab sebelum kerajaan Pagaruyung adalah sangat penting, sebab ini membuktikan ketuaan nagari ini. Nagari ini sudah berdiri dan kokoh jauh sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung. Nagari Sungai Tarab di dalam semua tambo Minangkabau disebut sebagai nagari yang berdiri setelah Pariangan dan Limokaum, yang disebut Datuak Katumanggungan bersama delapan kaum anggotanya. Permukiman pertama terlihat di dekat mata air (yang disebut sungai atau tempat pemandian) yang disana tumbuh sebatang kayu bernama kayu tarok, dengan demikian permukiman ini dinamai Sungai Tarok yang kemudian menjadi sungai tarab. Nama ini menjadi turun temurun sampai sekarang.

Setelah nagari ini didirikan oleh Datuk Katumanggungan, disusunlah suku sebanyak delapan buah. Kampung-kampung pun semuanya dibentuk waktu itu. Sejak itu sungai tarab telah dikenal dengan sebutan sungai tarab delapan batua. Pernah nagari sungai tarab menjadi ibu nagari kerajaan yang bernama kerajaan Bungo satangkai, suatu kerajaan yang didirikan oleh kelompok datuk katumanggungan setelah hancurnya kerajaan dusun tuo di limokaum, namun kemudian kerajaan ini runtuh pula setelah berdirinya kerajaan Bukit Batu Patah yang menjadi cikal bakal kerajaan Pagaruyung.

2. Di zaman kerajaan Pagaruyung

Ada yang disebut Rajo Tigo Selo yang terdiri dari :

- Rajo Alam di Gudam
- Rajo Adat di Buo
- Rajo Ibadat di Sumpur Kudus

Dan Basa Ampek Balai yang tersusun atas :

- Panitahan di Sungai Tarab, Pamuncak Koto Piliang
- Tuan Kadi di Padang Gantiang, Suluah Bendang Kotopiliang
- Andomo di Saruaso, Payung Panji Koto Piliang
- Makhkudum di Sumaniak, Aluang Bunian Koto Piliang

Dalam hal ini kita lihat kedudukan nagari Sungai Tarab ternyata merupakan nagari terpenting, tempat bersemayamnya ketua basa ampek balai. Jabatan panitahan (sekarang sama dengan perdana menteri) pada Kerajaan Pagaruyung dijabat oleh Datuk Bandaharo Putiah, suku Piliang Sani, Sungai Tarab, yang keturunannya masih ada di Rumah Gadang Sungai Tarab. Sebagai orang kedua setelah Raja Alam Minangkabau, Titah Sungai Tarab mempunyai rantau, suatu daerah ke mana ia berhak penuh untuk meminta upeti, yaitu kawasan Bandar X (Pesisir Selatan sekarang). Basa Ampek Balai adalah lembaga pemerintahan kerajaan pagaruyung, bukan lembaga adat, namun sekarang dipandang atau dihargai sebagai aset budaya Minangkabau dalam kerangka memupuk budaya nasional.

Para anggota basa ampek balai tadi mempunyai kelengkapan tertentu, seperti tabuah larangan (jalur komunikasi), yang masing-masing disebut :

- Tabuah larangan sungai tarab bernama Guruah di langik
- Tabuah larangan padang gantiang bernama sitakuik sayang
- Tabuah larangan sumanik bernama sipancarubo
- Tabuah larangan saruaso bernama silawang labiah

Sedangkan tabuah larangan raja alam di gudam pagaruyung bernama gaga di bumi dan si galugua, dan tabuah larangan tuan gadang batipuh bernama si Mabuak Berang, sedangkan tabuah larangan pariangan bernama mambang suleman. Bila ditilik lebih dalam, nagari sungai tarab jauh lebih tua dari nagari pagaruyung. Ranah tujuh balai yang kemudian bernama pagaruyung didirikan oleh tujuh buah kaum yang berpindah dari sungai tarab mengiringi raja yang mendirikan kerajaan bukit batupatah, dan terjadilah empat balai diateh dan tiga balai dibawah.

Dilihat dari sudut kelembagaan adat minangkabau, nagari sungai tarab adalah ibu nagari kelarasan adat koto piliang. Lembaga kelarasan adat ini bukanlah lembaga kerajaan pagaruyung. Ia telah ada sebelum kerajaan, dan kemudian kerajaan pagaruyung memanfaatkan lembaga ini dan menjadikannya sebagai tulang punggung kerajaan dengan menempatkan semua pejabat adat kotopiliang menjadi pejabat tinggi kerajaan. Sejak itu kerajaan pagaruyung didominasi oleh kotopiliang.

Sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung, nagari sungai tarab telah menjadi nagari induk kelarasan adat kotopiliang. Dengan hapusnya kerajaan pagaruyung itu. Sungai tarab sebagai induk nagari kotopiliang tidak hapus. Ia tetap sebagai induk nagari kelarasan adat kotopiliang di minangkabau. Sebagai nagari induk kelarasan adat kotopiliang, maka pelaksanaan adat kotopiliang dahulunya bermula di sungai tarab. Nagari sungai tarab menjadi ukuran bagi pelaksanaan adat koto piliang di Minangkabau. Dalam sistem waris penghulu, di nagari ini benar-benar diterapkan bunyi pepatah “patah tumbuah hilang baganti”, di sini tak ada penghulu yang punah yang tak digantikan. Orang boleh punah, tetapi lembaga penghulunya tetap dapat digantikan.

Dalam kerangka kelembagaan adat ditinjau dari kelarasan, Pagaruyung berada dibawah kekuasaan kotopiliang, tetapi sebaliknya di dalam lingkup Kerajaan Pagaruyung, dahulu sungai tarab berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Pagaruyung kedudukan raja, sedangkan di Sungai Tarab duduk panitahan, ketua basa ampek balai. Sebutan Panitahan kepada Datuk Bandaharo Putiah dimulai semenjak adanya kerajaan pagaruyung. Mestinya berakhir pula dengan hapusnya kerajaan pagaruyung itu, namun nampaknya sebutan panitahan atau titah terhadap pemakai gelar Datuk Bandaharo Putiah lebih umum dan dikenal atau populer ketimbang sebutan aslinya sebagai pamuncak kotopiliang, padahal sebutan pamuncak kotopiliang lebih asli, apalagi kerajaan pagaruyung sudah hapus dan selayaknya orang banyak harus kembali kepada panggilan aslinya yaitu menyebut dengan panggilan Pamuncak Kotopiliang.

3.2 Geografi Nagari Sungai Tarab

Sungai Tarab terletak menghampar landai menurut kemiringan Gunung Merapi dengan keadaan geografi semacam ini sangat member peluang baik dalam pengembangan pariwisata maupun pengembangan pertanian yang diwarnai oleh keindahan susunan sawah yang berjenjang – jenjang disertai padi menguning bagaikan emas diterpa cahaya matahari sehingga menambah tarikan yang mempesona kepada orang yang memandang, hanya saja sampai sekarang belum diolah untuk dijadikan tempat wisata alam.

Nagari Sungai Tarab terletak pada ketinggian 500 s/d 600 meter dari permukaan laut dengan luas 1. 296 ha dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Nagari Sumanik kecamatan Salimpaung
- Selatan berbatas dengan Nagari Gurun dalam Kecamatan Sungai Tarab
- Timur berbatas dengan Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang
- Barat berbatas dengan Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab

Jumlah penduduk menurut pendataan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Jumlah laki – laki	5.801
- <u>Jumlah Perempuan</u>	<u>5.801</u>
Jumlah	11.502

Luas wilayah kenagarian Sungai Tarab yang terdiri dari empat jorong dengan rincian sebagai berikut :

- Jorong Kotohiling	191 ha
- Jorong Sungai Tarab	613 ha
- Jorong Tiga Batua	247 ha
- <u>Jorong Koto Panjang</u>	<u>245 ha</u>
Jumlah	1. 296 ha

Perincian Penggunaan Tanah adalah sebagai berikut :

- Persawahan	818 ha
--------------	--------

-	Pekarangan/Tanah Bangunan/halaman	105 ha
-	Tegal/kebun/ladang/huma	245 ha
-	Kolam ikan	98 ha
-	Hutan	7 ha
-	Tempat rekreasi/olah raga/pemandian	4,75 ha
-	Jalan raya/Prov/Kab/Kec/Nagari	7 ha
-	<u>Dan lain – lain</u>	<u>11,25 ha</u>
	Jumlah	1. 296 ha

A. Tanah Ulayat Nagari (Bukit, Gunung, Hamparan, Guguk)

Perincian Penggunaan Tanah adalah sebagai berikut :

-	Persawahan	818 ha
-	Pekarangan/Tanah Bangunan/halaman	105 ha
-	Tegal/kebun/ladang/huma	245 ha
-	Kolam ikan	98 ha
-	Hutan	7 ha
-	Tempat rekreasi/olah raga/pemandian	4,75 ha
-	Jalan raya/Prov/Kab/Kec/Nagari	7 ha
-	<u>Dan lain – lain</u>	<u>11,25 ha</u>
	Jumlah	1. 296 ha

Sungai Tarab merupakan salah satu nagari yang sekaligus menjadi nama kecamatan yaitu kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini terletak di dekat Batusangkar, ibu kota dari Kabupaten Tanah Datar. Nagari Sungai Tarab memiliki luas wilayah sekitar 12,96 km². Dalam tambo pada nagari ini dikenal dengan tempat kedudukan salah seorang dari Basa Ampek Balai (Empat Menteri Utama) yaitu yang dikenal dengan sebutan Bandaro di Sungai Tarab, dan juga termasuk ke dalam Langgam Nan Tujuh yaitu Pamuncak Koto Piliang (A.Dt Madjoindo, 1959).

Nagari Sungai Tarab berada di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari Sungai Tarab 12,96

kilometer persegi atau 18,04 persen dari luas wilayah Kecamatan Sungai Tarab. Nagari Sungai Tarab, berjarak sekitar 5 kilometer dari ibu kota kabupaten Batusangkar. Nagari Sungai Tarab berpenduduk 9.328 jiwa (2017), yang terdiri dari 4.587 laki-laki dan 4.741 perempuan serta 2.255 rumah tangga. Nagari Sungai Tarab terdiri dari 4 jorong, yakni :

1. Sungai Tarab
2. Koto Panjang
3. Tigo Batua
4. Koto Hiliang

3.3 Tugas dan Peran Pemerintahan Nagari Sungai Tarab

Tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari yang dimana urusan pemerintahan nagari melaksanakan pembangunan nagari, melaksanakan urusan kemasyarakatan nagari dan juga urusan keuangan nagari. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008.

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan nagari, wali nagari memiliki peran yang sangat penting karena wali nagari merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan asas pemerintahan desa seperti kepastian hukum, tertib kepentingan umum, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di nagari harus diketahui dan mendapat persetujuan dari wali nagari terlebih dahulu karena hal ini mencakup wilayah kekuasaannya.

Wali nagari yang dibantu oleh perangkat nagari dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan nagari adalah membuat rencana kegiatan anggaran nagari, menjalankan kegiatan administrasi nagari, dan membuat peraturan nagari.

1. Rencana Kegiatan Anggaran Nagari

Rencana kegiatan anggaran nagari merupakan dokumen perencanaan anggaran nagari yang memuat tentang anggaran di setiap bidang dalam pemerintahan di mulai dari bidang menyelenggarakan

pemerintahan nagari, bidang pelaksanaan pembangunan nagari, bidang pembinaan masyarakat nagari dan bidang pemberdayaan masyarakat nagari. Dan rencana kegiatan anggaran nagari sudah tertuang sekaligus di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nagari).

2. Administrasi Pemerintahan Nagari

Pelayanan administrasi nagari merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur pemerintahan nagari (wali nagari) sebagai abdi masyarakat dan abdi nagari, sebagai pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Pelayanan administrasi nagari dapat diartikan pemberi layanan atau keperluan orang atau masyarakat dengan aturan dan cara yang telah ditetapkan. Dan berbagai macam jenis pelayanan administrasi yang ditawarkan pemerintahan nagari.

Sesuai dengan Permendagri No.32 Tahun 2006 “Pedoman Administrasi Desa, Kewajiban wali nagari menyelenggarakan administrasi pemerintahan nagari yang baik sebagai wali nagari dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan nagari dan untuk menata kembali pelaksanaan administrasi nagari sehingga dapat bekerja lebih baik dalam menyelenggarakan administrasi nagari yang semakin luas dan efektif sejalan dengan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Adapun jenis-jenis pelayanan administrasi yang dilakukan wali nagari beserta perangkat nagari, seperti yang ada pada tabel di bawah ini

Tabel 3.1
Jenis Pelayanan Administrasi

No	Jenis Administrasi
1	Surat pengantar 1. Surat pengantar pembuatan kartu tanda penduduk 2. Surat pengantar kelakuan baik 3. Surat pengantar kartu keluarga

	4. Surat pengantar pernikahan
2	Surat Keterangan 1. Surat keterangan tidak mampu 2. Surat keterangan izin usaha 3. Surat keterangan pindah
3	Surat penting lainnya

Sumber : Wawancara (Miftahul, 22 Juni 2023, 10.00 WIB)

3. Peraturan Nagari

Peran seorang wali nagari sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, karena seorang wali nagari yang bergerak lebih awal, mengarahkan, membimbing, menuntun dan menggerakkan masyarakat. Dimana wali nagari kepala pemerintahan dan wakil rakyat harus mampu untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kedudukan wali nagari sebagai alat pemerintahan nagari dan pelaksana roda pemerintahan di atas nagari, dari kedudukan tersebut wali nagari mempunyai tugas pokok untuk pemerintahan urusan rumah tangga sendiri dalam menjalankan urusan pemerintahan nagari.

Tabel 3.3
Peraturan Nagari Sungai Tarab

No	Nama Peraturan Nagari	Tahun Peraturan Nagari
1	Peraturan Nagari Sungai Tarab Tentang Kewenangan Nagari	2020
2	Peraturan Nagari Sungai Tarab Tentang K4L	2019
3	Peraturan Nagari Sungai Tarab Tentang Pasar	2022
4	Peraturan Nagari Sungai Tarab Tentang Penyakit Masyarakat	2019

Sumber : Wawancara BPRN Nagari Sungai Tarab

3.3 Badan Usaha Milik Nagari Lenggogeni

3.2.1 Sejarah dan Gambaran Umum Badan Usaha Milik Nagari

1. Sejarah Badan Usaha Milik Nagari

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) merupakan lembaga ekonomi nagari yang dibentuk sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada nagari atau desa untuk membentuk badan usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari guna mengelola potensi ekonomi lokal.

Di Provinsi Sumatera Barat, implementasi BUMDes disesuaikan dengan sistem pemerintahan adat Minangkabau, sehingga lahirlah istilah BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari.

Pembentukan BUMNag di Kabupaten Tanah Datar, termasuk di Kecamatan Sungai Tarab, didorong oleh Pemerintah Kabupaten sebagai salah satu strategi penguatan ekonomi nagari dan peningkatan Pendapatan Asli Nagari (PAN). Gagasan ini muncul sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat nagari berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perdagangan, dan jasa (Jhingan, 2007).

Secara historis, Kecamatan Sungai Tarab dikenal sebagai daerah agraris dengan sistem sosial ekonomi yang kuat berbasis gotong royong dan *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Masyarakat Sungai Tarab memiliki tradisi ekonomi lokal yang sudah berjalan sejak lama, seperti koperasi nagari, usaha tani bersama, dan perdagangan hasil bumi. Melalui pembentukan BUMNag, potensi tersebut diorganisir dalam satu wadah usaha resmi yang memiliki legalitas hukum serta sistem manajemen modern.

BUMNag pertama kali berdiri di beberapa nagari di Kecamatan Sungai Tarab pada kisaran tahun 2017–2019, setelah adanya dorongan dan pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Datar. Sejak itu, beberapa nagari di wilayah Sungai Tarab, seperti Nagari Pasie Laweh, Sungai Tarab, dan Gurun, mulai mendirikan BUMNag dengan bidang

usaha yang disesuaikan dengan potensi masing- masing nagari (Susi, 2020).

2. Gambaran Umum BUMNag di Kecamatan Sungai Tarab

Kecamatan Sungai Tarab terletak di bagian tengah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia dengan ibu kota Batusangkar dengan jumlah Kecamatan 14 Kecamatan, dan dengan jumlah Nagari 75 Kenagarian. Dimana dari ke 75 nagari di Tanah Datar, terdapat 71 Nagari yang sudah mendirikan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Data Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

Kecamatan	Nagari	Nama BUMNag	Tahun Berdiri
X Koto	Singgalang	Singgahan Alang	2017
	Paninjauan	Paninjauan Sakato	2018
	Pandai Sikek	Bukik Kumayan	2018
	Panyalaian	Panyalaian Sejahtera	2017
	Aia Angek	Aia Angek Saiyo	2017
	Tambangan	Tigo Sapilin	2017
	Jaho	Talago Kumbang	2017
	BKoto Baru	Bersatu Maju Sejahtera	2018
	Koto Laweh	Atthayibah	2017
Batipuh	Gunuang Rajo	Harapan Baru	2016
	Andaleh	Andaleh Usaha Mandiri	2016
	Sabu	Marapi Jaya	2016

	Batipuah Ateh Batipuah Baruah Pitalah Tanjung Barulak Bungo Tanjung	Indo Jati Mandiri Pinang Balirik Pitalah Sakato Satampang Baniah B.T. Saiyo Sakato	2016 2017 2017 2017 2017
Batipuh Selatan	Sumpur Guguak Malalo Batu Taba P. Laweh Malalo	Maju Basamo Talago Mansiro Sariek Sarumpun Tmuniak	2017 2018 2017 2017
Pariangan	Sawah Tengah Sungai Jambu Simambur Pariangan Tabek Batu Basa	Usaha Rakyat Galundi Baselo Sitangko Rangkiang Nagari Puro Bakambang Bunian Indah	2016 2017 2017 2016 2018 2019
Rambatan	Rambatan Padang Magek Balimbing Simawang	Rampapa Berkah Padang Magek Sakato Balimbiang Jaya Simawang	2020 2017 2020 2017
Lima Kaum	Lima Kaum Cubadak Baringin Parambahan Labuah	Paga Kaum Cubadak Sakato Baringin Saiyo Salhona Rangkiang Nagari	2016 2017 2017 2016 2017
Tanjung Emas	Pagaruyuang Saruaso	Pagaruyuang Surayaseh	2017 2017
Padang Gantiang	Atar Padang Ganting	Tunas Atar Mandiri Pagan Sakato	2017 2018
Lintau Buo	Taluak Buo Pangian Tigo Jangko	Semasta Jibaku Pangian Jaya Lumbuang Basamo	2017 2017 2018 2019
Lintah Buo Utara	Batu Bulek Balai Tengah Tanjung Bonai Lubuk Jantan	Pandang Budi Balai Tongah Sarumpun Tanjung Bonai Sarumpun Sejahtera	2016 2020 2018 2016

Sungayang	Minangkabau	Tali Tigo Sapilin	2020
	Sungai Patai	Batu Bakudo	2017
	Sungayang	Rangkiang Maimbau	2016
	Tanjuang	Ngalau Soda Tanah	2016
	Andaleh B. Bukik	Kowi	2016
Sungai Tarab	Sungai Tarab	Bungo Setangkai	2017
	Gurun	Saiyo Sakato	2017
	Koto Tuo	Barokah	2017
	Pasia Laweh	Bukik Sakumpua	2017
	Rao-Rao	Maju Bersama	2017
	Kumango	Batang Simonce	2017
	Koto Baru	Bukik Rangkiang	2017
	Padang Laweh	Cinto Nagari Tunas	2017
	Simpuruik	Mekar	2018
	Talang Tengah	Tuah Sakato	2017
Salimpauang	Situmbuk	Sinar Mas	2018
	L.	Panyusunan	2016
	Mandahiliang	Amanah	2017
	Supayang	Duo Baleh Suku	2018
	Salimpauang	Sumanik Bangkik	2017
	Sumanik	Tabek Makmur	2018
	Tabek Patah		
Tanjung Baru	Barulak	Wahana Karya	2017
	Tanjuang	Mandiri	2016
	Alam	Sejahtera Mandiri	

Sumber: Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar

Dari Tabel 3.5 di atas, dapat dilihat bahwa di Kabupaten Tanah Datar ada 75 nagari dengan BUMNag yang berjumlah 71 BUMNag. Tanah datar merupakan salah Kabupaten yang terbanyak dalam pembentukan BUMNag di provinsi Sumatera Barat.

Keadaan sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai adat dan semangat kebersamaan mendukung pengembangan BUMNag sebagai lembaga ekonomi berbasis masyarakat lokal

1) Tujuan Pembentukan BUMNag di Sungai Tarab

Adapun tujuan pembentukan BUMNag adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan asli nagari (PAN).
- b. Mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.
- c. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat nagari.
- d. Menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
- e. Mendorong kemandirian nagari dalam pengelolaan aset dan pelayanan publik.

2) Bidang Usaha BUMNag di Sungai Tarab

Berdasarkan hasil observasi dan data dari pemerintah nagari, bidang usaha yang dikembangkan oleh BUMNag di Kecamatan Sungai Tarab meliputi:

- a. Perdagangan hasil pertanian, seperti penjualan gabah, beras, dan pupuk.
- b. Jasa simpan pinjam atau keuangan mikro, untuk membantu permodalan usaha kecil.
- c. Usaha pengelolaan air bersih dan kebersihan nagari.
- d. Usaha pariwisata lokal, seperti pengelolaan objek wisata alam dan kuliner tradisional.
- e. Pengelolaan aset nagari, seperti pasar nagari dan bangunan publik.

Masing-masing BUMNag menyesuaikan bidang usahanya dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya: BUMNag Sungai Tarab berfokus pada perdagangan hasil pertanian, BUMNag Pasie Laweh mengembangkan sektor wisata alam dan kuliner lokal, BUMNag Gurun bergerak dalam usaha simpan pinjam masyarakat.

3.2.2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Nagari Lenggogeni

1. Nama dan Tempat Kedudukan BUMNag

Nama badan usaha ini adalah BUMNag Lenggogeni Sungai Tarab.

Secara umum BUMNag adalah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah nagari dan masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi lokal, meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN), dan mendorong kesejahteraan masyarakat. BUMNag Lenggogeni berkedudukan di Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Tanah datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Tempat kedudukan BUMNag memiliki arti penting karena menjadi alamat hukum resmi BUMNag, menjadi pusat administrasi dan pengelola usaha, menentukan wilayah operasional utama, dan menjadi dasar hukum dalam pembuatan akta pendirian dan peraturan nagari.

2. Pendirian BUMNag Lenggogeni

Maksud pendirian BUMNag Lenggogeni adalah 1) Mengoptimalkan potensi nagari, mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi usaha yang ada di Nagari Sungai Tarab agar memberikan nilai ekonomi yang maksimal. 2) Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN), memberikan kontribusi terhadap kas nagari melalui keuntungan usaha yang dijalankan. 3) menyediakan layanan ekonomi bagi masyarakat seperti simpan pinjam, perdagangan, jasa, dan usaha produktif lainnya. 4) Mendorong kemandirian ekonomi Nagari, mengurangi ketergantungan Nagari terhadap bantuan pemerintah dengan menciptakan sumber pendapatan sendiri.

3. Tujuan BUMNag Lenggogeni

Tujuan yang ingin dicapai antara lain: 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja bagi warga Nagari Sungai Tarab serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui unit-unit usaha yang dijalankan. 2) mengembangkan usaha produktif, mengelola usaha seperti perdagangan, pertanian, jasa, simpan pinjam, pengelolaan aset nagari (sesuai potensi dan kebutuhan nagari). 3) memberdayakan UMKM lokal, mendukung pelaku usaha kecil dan menengah melalui permodalan, pemasaran, dan pendampingan usaha. 4)

meningkatkan perekonomian Nagari secara berkelanjutan, menciptakan sistem usaha yang profesional, akuntabel dan berorientasi jangka panjang. 5) mewujudkan tata kelola yang transparan, menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, profesional.

4. Kewenangan pengurus/Pengelola BUMNag Lenggogeni

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk menjalankan tugas, berikut kewenangannya: 1) kewenangan manajerial, pengurus berwenang untuk menyusun rencana kerja tahunan dan rencana bisnis, mengembangkan unit usaha sesuai potensi nagari, mengelola kegiatan operasional harian, dan mengambil keputusan teknis usaha. 2) kewenangan administratif yaitu mengelola administrasi keuangan dan pembukuan, membuat laporan pertanggungjawaban berkala, mengarsipkan dokumen usaha dan kontra kerjasama. 3) kewenangan keuangan yaitu mengelola modal usaha yang telah disertakan nagari, mengatur arus kas dan pembiayaan usaha, menentukan kebijakan operasional. Menentukan kebijakan operasional keuangan sesuai AD/ART. Namun pengurus tidak berwenang mengalihkan aset nagari tanpa persetujuan, mengubah bentuk usaha tanpa musyawarah, mengambil kebijakan strategis diluar rencana tanpa persetujuan penasihat/pengawas. 4) kewenangan kerja sama, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (swasta, koperasi, lembaga keuangan), menandatangani perjanjian kerja sama atas nama BUMNag (sesuai batas kewenangan).

5. Fungsi pengurus/pengelola BUMNag Lenggogeni

Fungsi utama peran yang dijalankan dalam organisasi yaitu 1) fungsi ekonomi, mengembangkan usaha produktif, meningkatkan PAN dan membuka lapangan pekerjaan masyarakat. 2) fungsi sosial, memberdayakan masyarakat nagari, membantu UMKM lokal dan memberikan pelayanan usaha yang terjangkau. 3) fungsi pengelolaan aset, mengoptimalkan aset nagari agar bernilai ekonomi, menjaga dan merawat aset yang dikelola. 4)

fungsi perencanaan dan pengembangan, mengidentifikasi potensi ekonomi (pertanian, perdagangan, jasa, wisata), membuat inovasi usaha baru, dan menyusun strategi pengembangan jangka panjang. 5) fungsi pertanggungjawaban, menyampaikan lapran keuangan bulanan/tahunan, melaporkan hasil usaha kepada Wali Nagari, Badan Musyawarah Nagari, dan masyarakat melalui forum masyarakat.

6. Struktur Modal BUMNag Lenggogeni

Berdasarkan prinsip umum BUMNag di Sumatera Barat dan Tanah Datar modal BUMNag Lenggogeni berasal dari berbagai sumber yang sah, yang umumnya tertuang dalam Peraturan Nagari (Pernag) tentang pendirian BUMNag. Asal modal tersebut meliputi: 1) penyertaan modal nagari, modal awal yang utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Sungai Tarab, ini dikategorikan sebagai kekayaan nagari yang dipisahkan. 2) penyertaan modal masyarakat, tabungan, saham, atau dana dari masyarakat nagari yang diinvestasikan ke dalam BUMNag. 3) bantuan pemerintah, bantuan dari pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten Tanah Datar. 4) Hibah dan Sumbangan, hibah dari pihak ketiga atau bantuan sah lainnya yang tidak mengikat. 5) kerja sama usaha, modal yang berasal dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga (pihak swasta atau BUMDes/BUMNag).

7. Proporsi Kepemilikan Modal

Proporsi kepemilikan modal di BUMNag Lenggogeni secara hukum diatur sebagai berikut; 1) dominasi pemerintah nagari, sebagian besar modal (mayoritas) harus dimiliki oleh pemerintah nagari. Hal ini memastikan bahwa konyol dan arah kebijakan BUMNag tetao berada di bawah pengawasan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPRN). 2) partisipasi masyarakat, masyarakat dapat memiliki sebagian kecil saham atau penyertaan modal namun tidak boleh melebihi proporsi modal pemerintah nagari untuk menjaga kepemilikan lokal. 3) kepemilikan dipisah, meskipun modal berasal dari APBNagari,

pengelolaannya dipisahkan dari APBNagari untuk operasional bisnis, dimana pengurus bertanggung jawab penuh.

8. Modal Dasar dan Modal Kerja

Dalam operasionalnya modal BUMNag Lenggogeni dibagi menjadi dua konsep yaitu: 1) modal dasar (permodalan awal); modal dasar adalah total aset (uang tunai dan barang) yang diserahkan oleh nagari saat pendirian, dicatat dalam neraca awal. Modal ini digunakan untuk membiayai infrastruktur dasar, pembelian aset tetap (mesin, kendaraan, bangunan), atau modal awal untuk unit usaha. 2) modal kerja (*working capital*); modal kerja adalah bagian dari modal yang digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari unit usaha BUMNag (misalnya pembelian stok barang, biaya listrik, gaji staf, bahan baku). Modal kerja diperoleh dari pendapatan usaha dan penyertaan modal bergulir. Pengelolaan modal kerja di BUMNag yang baik di Tanah Datar berfokus pada efisiensi agar aktiva lancar dapat menghasilkan propabilitas (keuntungan) yang tinggi.

9. Pengelolaan dan Penggunaan Modal

Penggunaan modal BUMNag Lenggogeni diatur dalam perturan daerah harus 1) usaha produktif, digunakan untuk unit usaha yang memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, seperti pengelolaan aset nagari, jasa pelayanan, atau perdagangan. 2) transparan dan akuntabel, penggunaan modal dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam musyawarah nagari. 3) peningkatan potensi lokal, modal diarahkan untuk memaksimalkan potensi sumber daya di nagari Sungai Tarab.

10. Kegiatan dan Jenis Usaha BUMNag Lenggogeni

1) Konsep dan fokus utama (BUMNag bersama), Lenggogeni beroperasi sebagai BUMNag Bersama (BUMNag-Ma). Artinya lembaga ini menaungi unit usaha yang dikelola secara kolektif oleh beberapa nagari di kecamatan Sungao Tarab. Fokus utamanya adalah

memfasilitasi kebutuhan bersama, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan mengurangi pengangguran. 2) Jenis-jenis usaha yang dijalankan; jenis usaha BUMNag Lenggogeni didasarkan pada potensi ekonomi, sumber daya alam, dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Sungai Tarab. Berdasarkan konteks perdesaan dan hasil musyawarah, unit usahanya mencakup; unit usaha pertanian dan alat mesin pertanian (Alsintan), pengelolaan jasa dan sarana produksi pertanian (Saprotan), unit usaha air bersih (PAM Nagari), pemasaran produk unggulan nagari. 3) Kegiatan dan peran strategis, kegiatan yang dijalankan BUMNag Lenggogeni tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit), tetapi juga pelayanan sosial; musyawarah antar nagari (MAN), pemberdayaan masyarakat, pilar ekonomi lokal.

11. Tata cara penggunaan BUMNag Lenggogeni Sungai Tarab

1) Penggunaan modal usaha (permodalan); pemyertaan modal nagari, pengadaan aset, dan dana bergulir. 2) tata cara operasional harian; pelaksana operasional dikelola oleh direksi (ketua, sekretaris, bendahara) yang ditetapkan oleh keputusan Wali Nagari, prosedur pengeluaran kas harus melalui persetujuan direktur dan bendahara didukung dengan nota/bukti sah, pengawasan dibentuk melalui musnag bertugas mengawasi kinerja dan penggunaan anggaran setiap 1-3 bulan. 3) penggunaan dana untuk usaha; penggunaan dana untuk unit usaha seperti pembelian pupuk, perbaikan mesin yang disetujui dalam RAK.

12. Pembagian Keuntungan (Sisa Hasil Usaha/SHU) BUMNag

1) Proporsi pembagian SHU, umumnya dibagi menjadi beberapa persentase dalam Ad/ART; a) Pendapatan Asli Nagari (PAN), bagian terbesar biasanya 40-50 % disetorkan ke kas nagari untuk pembangunan, b) penambahan modal BUMNag, 20-30 % digunakan kembali untuk membesarkan usaha, c) Pengurus BUMNag 10-15 % sebagai insentif kerja, d) dana sosial pendidikan 5-10 % untuk masyarakat sekitar. 2) Mekanisme pembagian; a) laporan keuangan disusun tahunan, b)

musyawarah Desa/Nagari dipaparkan dalam musnag, dan SHU disahkan, c) penyetoran disetorkan ke rekening nagari, sementara sebagian modal diinvestasikan kembali.

13. Pembagian Risiko Kerugian Usaha BUMNag Lenggogeni

Prinsip dasar tanggung jawab terbatas, prinsip utama kerugian adalah; kerugian ditanggung oleh modal BUMnag iyu sendiri, pemerintah Wali Nagari tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian, kecuali disebabkan oleh kelalaian pengurus. 2) Ketentuan risiko jika masuk ke AD/ART; a) kerugian wajar (usaha gagal) ditutup dari laba ditahan, jika laba ditahan tidak mencukupi maka modal awal BUMNag (APBNagari) akan berkurang, prosedur kerugian wajib dilaporkan oleh direksi kepada musnag. b) kerugian akibat kesalahan/kelalaian; tanggung jawab pribadi yang bersangkutan wajib mengganti kerugian, prosedur akan dilakukan audit oleh Badan Pengawas BUMNag atau auditor eksternal. c) Pailit/bangkrut; jika BUMNag tiak dapat menutupi kerugian dengan set yang dimilikinya maka BUMNag dapat dinyatakan pailit melalui musnag. Prosedurnya likuidasi (penjualan aset) dilakukan untuk membayar hutang kepada kreditur. Wali Nagari berwenang mengajukan kepailitan. 3) Ketentuan khusus pada unit usaha, jika BUMNag memiliki beberapa unit usaha AD/ART mengatur kerugian pada satu unit usaha tidak langsung membebani unit usaha lain jika menajemennya terpisah, namun secara hukum, BUMNag sebagai satu kesatuan badan hukum tetap bertanggung jawab atas utang unit usaha. 4) Mitigasi risiko dalam AD/ART; untuk meminimalisir risiko, AD/ART BUMNag Lenggogeni mengatur, a) audit internal, pengawas BUMNag wajib melakukan audit setidaknya 1-2 kali setahun. b) laporan rutin pelaksana operasional wajib melaporkan kinerja keuangan kepada Wali Nagari dan Musnag. c) penyisihan cadangan, setiap keuntungan, sebagian wajib disisihkan sebagai laba ditahan (cadangan kerugian) sebelum dibagi sebagai PADes (Pendapatan Asli Desa).

3.3.3 STRUKTUR Organisasi Bumrag LENGGOGENI LKD Kecamatan Sungai TARAB

